



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan mewujudkan tertib administrasi dalam penomoran naskah dinas serta penataan dan penyimpanan arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pola Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kode pemisahan arsip atas dasar perbedaan yang ada serta pengelompokan arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain di lingkungan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan memberikan kode pengenal sesuai dengan masalah yang terkandung didalamnya.

Pasal 2

Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyimpanan arsip dan penemuan kembali arsip dengan cepat dan tepat (*retrieval*) jika diperlukan, dengan cara memberikan kode klasifikasi dalam bentuk penomoran pada setiap naskah dinas yang masuk atau keluar dari lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

### Pasal 3

Susunan Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengikuti sifat permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur yang ada dalam struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu:

- a. Klasifikasi Fasilitatif; dan
- b. Klasifikasi Substantif.

### Pasal 4

- (1) Klasifikasi Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan klasifikasi penunjang dan menyangkut pekerjaan pengorganisasian, prosedur dan kebijakan instansi, kerumahtanggaan, legalisasi, keuangan, kepegawaian, serta pekerjaan administrasi intern instansi.
- (2) Klasifikasi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan masyarakat.

### Pasal 5

Unsur yang terdapat pada klasifikasi arsip baik klasifikasi fasilitatif maupun klasifikasi substantif terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. pokok masalah;
- b. sub masalah; dan
- c. sub-sub masalah.

### Pasal 6

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan gabungan kode huruf dan angka.
- (2) Pokok masalah, merupakan masalah utama yang terdapat pada klasifikasi diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan penyebutan pokok masalah.

- (3) Sub masalah, adalah bagian dari pokok masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 01 (nol satu), 02 (nol dua), dan seterusnya.
- (4) Sub-sub masalah, adalah bagian dari sub masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 01 (nol satu), 02 (nol dua), dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan kode sub masalah.

#### Pasal 7

Untuk pemberian kode klasifikasi atau penomoran pada setiap naskah dinas, kode huruf untuk pengenalan pokok masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode, sedangkan kode angka untuk sub masalah ditempatkan pada bagian kedua dan sub-sub masalah ditempatkan pada bagian ketiga dari susunan kode.

#### Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan unit organisasi menghadapi sub masalah atau sub-sub masalah yang belum tertampung dalam klasifikasi arsip yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, dapat menambah sub masalah atau sub-sub masalah dengan pemberian kode nomor sebagai kelanjutan dari nomor terakhir dari tiap sub masalah dan sub-sub masalah yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Rincian lengkap Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan kearsipan pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disesuaikan dengan Klasifikasi arsip yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini serta dapat merinci lebih

lanjut terhadap kode klasifikasi arsip sesuai keperluan unit organisasinya.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2017

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI



DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
POLA KLASIFIKASI ARSIP DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. BENTUK DAN SUSUNAN
- B. CARA PENGGUNAAN

BAB II KLASIFIKASI ARSIP

- A. KODE KLASIFIKASI
- B. ARSIP SUBSTANTIF

BAB III PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. BENTUK DAN SUSUNAN

1. Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi/kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dan dibagi menjadi 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) perincian dasar. Perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga merupakan pola dasar yang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kode masalah yang tercantum dalam Pola Klasifikasi.
3. Untuk membedakan rincian pertama, kedua dan ketiga dipergunakan kode huruf dan angka. Huruf adalah kode rincian pertama (masalah primer), angka pertama merupakan kode rincian kedua (masalah sekunder) dan angka kedua merupakan kode rincian ketiga (masalah tertier).

### B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami Klasifikasi Arsip harus memahami rincian pertama, kedua dan ketiga serta memahami hubungan antara masalah dengan sub masalah dan sub-sub masalahnya.
2. Tiap kode sub masalah dan sub-sub masalah merupakan rincian dari pokok masalah.

Contoh :

OT.00.03

OT : Kode rincian pertama/masalah primer ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

00 : Kode rincian kedua/masalah sekunder dari ORGANISASI DAN TATA LAKSANA yaitu ORGANISASI

03 : Kode rincian ketiga/masalah tertier dari ORGANISASI DAN TATA LAKSANA yaitu Unit Pelaksana Teknis (BALAI BESAR/BALAI).

Dari contoh di atas dapat diartikan bahwa kode OT.00.03 adalah naskah dinas yang berkenaan dengan usul pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan organisasi Unit Pelaksana Teknis (Balai

Besar/Balai) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3. Untuk dapat menentukan Kode Klasifikasi suatu arsip secara tepat harus dipahami masalah yang terkandung dan dari sudut pandang mana masalah itu disajikan.
4. Arsip yang mempunyai lebih dari satu masalah harus ditetapkan masalah yang lebih utama dikaitkan dengan tugas dan fungsi unit kerja yang mendayagunakan arsip.
5. Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari 16 (enam belas) pokok masalah, yang terdiri dari kegiatan Fasilitatif dan Substantif yang mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi baik di Pusat maupun di UPT, yaitu :

**KEGIATAN FASILITATIF (8 pokok masalah)**

- |    |                                    |         |
|----|------------------------------------|---------|
| 1) | KEUANGAN                           | kode KU |
| 2) | KEPEGAWAIAN                        | kode KP |
| 3) | PERENCANAAN                        | kode PR |
| 4) | HUKUM                              | kode HK |
| 5) | ORGANISASI DAN TATA LAKSANA        | kode OT |
| 6) | UMUM                               | kode UM |
| 7) | HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA | kode HM |
| 8) | PENGAWASAN                         | kode PW |

**KEGIATAN SUBSTANTIF (8 pokok masalah)**

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1) | KEBIJAKAN  | kode BIJ |
| 2) | PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                               | kode PMD |
| 3) | PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  | kode PKP |
| 4) | PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU   | kode PDU |
| 5) | PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  | kode PDT |
| 6) | PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI                  | kode PKT |
| 7) | PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI  | kode MKT |
| 8) | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI | kode BLI |

BAB II  
KLASIFIKASI ARSIP

A. KODE KLASIFIKASI

**1. KU KEUANGAN**

**00 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ APBN-P**

- 01 Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara
- 02 Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Komisi DPR-RI
- 03 Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI
- 04 Ketetapan Pagu Definitif
- 05 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- 06 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Termasuk Revisinya
- 07 Target Penerimaan Negara bukan Pajak

**01 Pelaksanaan Anggaran**

- 01 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmirasi
- 02 Surat Setoran Pajak (SSP)
- 03 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
- 04 Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 05 Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
- 06 Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank
- 07 Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Masing-masing Satker
- 08 Laporan Pengelolaan BMN

**02 Belanja**

- 01 Surat Penyedia Dana (SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GU)
- 02 Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 03 Pembukuan Anggaran
- 04 Daftar Gaji

- 05 Kartu Gaji
- 06 Laporan Kas
- 07 Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
- 08 Laporan Keuangan Tahunan

**03 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri**

- 01 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (*Blue Book*)
- 02 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (*Grey Book*)
- 03 Dokumen *Memorandum Of Understanding* (MoU) dan Dokumen Sejenisnya
- 04 Dokumen *Loan Agreement* (PHLN)
- 05 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri
- 06 Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)
- 07 Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*)
- 08 Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri
- 09 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor)
- 10 *Staff Appraisal Report*
- 11 Report/Laporan (*Progress, Monthly dan Quarterly*)
- 12 Laporan Hutang Daerah
- 13 *Completion Report/Annual Report*
- 14 Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

**04 Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri**

- 01 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
- 02 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang/Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
- 03 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
- 04 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang

Penetapan Pejabat Pembuat Daftar Gaji termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan

- 05 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Pejabat Penandatangan SPM termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
- 06 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
- 07 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan

**05 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)**

- 01 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
- 02 Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM)
- 03 Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulan/Semester

**06 Pertanggungjawaban Keuangan Negara**

- 01 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- 02 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Jenderal
- 03 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional  
Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan aparat pemeriksa fungsional seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP), dan Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP
- 04 Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara  
Naskah dinas yang berhubungan dengan penyelesaian kerugian keuangan negara, termasuk di dalamnya Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

## **2. KP KEPEGAWAIAN**

### **00 Formasi Pegawai**

- 01 Usulan dari Unit Kerja
- 02 Usulan Permintaan Formasi kepada MenPan RB dan Kepala BKN
- 03 Persetujuan MenPan dan RB
- 04 Penetapan Formasi PNS
- 05 Penetapan Formasi Khusus

### **01 Penerimaan/Pengadaan Pegawai**

- 01 Proses Penerimaan Pegawai  
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, keputusan hasil ujian dan wawancara
- 02 Penetapan Pengumuman Kelulusan
- 03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
- 04 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP  
Naskah dinas yang meliputi surat lamaran, ijazah, SKCK, kartu kuning dan surat keterangan kesehatan
- 05 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 2 (dua) Tahun
- 06 Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif

### **02 Pembinaan Karir Pegawai**

- 01 Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai  
Naskah dinas yang berkenaan dengan surat perintah/surat tugas/surat keputusan/surat izin dan laporan kegiatan pengembangan diri
- 02 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL)/Sertifikat
- 03 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Standar Kinerja Pegawai (SKP)
- 04 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- 05 Disiplin Pegawai  
naskah dinas yang meliputi daftar hadir dan

rekapitulasinya

- 06 Berkas Hukuman Disiplin
- 07 Penghargaan dan Tanda Jasa

**03 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai**

**04 Mutasi Pegawai**

- 01 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit
- 02 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
- 03 Mutasi Keluarga
- 04 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
- 05 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu)
- 06 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
- 07 Peninjauan Masa Kerja
- 08 Berkas Baperjakat

**05 Administrasi Pegawai**

- 01 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
- 02 Cuti Besar
- 03 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
- 04 Cuti Alasan Penting
- 05 Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
- 06 Dokumentasi Identitas Pegawai  
Naskah dinas yang berkenaan usul penetapan karpeg/KPE/karis/karsu, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, laporan pajak penghasilan pribadi (LP2P) dan keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4)
- 07 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- 08 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
- 09 Berkas Pengurusan Tunjangan Jabatan

**06 Kesejahteraan Pegawai**

- 01 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan

- Pegawai
- 02 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES
  - 03 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
  - 04 Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial
  - 05 Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas
  - 06 Berkas tentang Layanan Pegawai yang Meninggal karena Dinas
  - 07 Berkas tentang Pemberian Tali Kasih
  - 08 Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
  - 09 Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi
- 07 Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun**
- 08 Perselisihan/Sengketa Pegawai**
- 09 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya & PNS yang Meninggal**
- 10 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil**
- 01 Berkas Lamaran yang Diterima
  - 02 Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya
  - 03 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
  - 04 S.K. Pengangkatan CPNS
  - 05 Hasil Pengujian Kesehatan
  - 06 S.K. Pengangkatan PNS
  - 07 S.K. Peninjauan Masa Kerja
  - 08 S.K. Kenaikan Pangkat
  - 09 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan
  - 10 S.K.Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu)
  - 11 S.K.Perpindahan Wilayah Kerja
  - 12 S.K. Perpindahan Antar Instansi
  - 13 S.K. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
  - 14 Berita Acara Pemeriksaan
  - 15 S.K.Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS
  - 16 S.K.Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk
  - 17 S.K.Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan

- 18 S.K.Pemberian Uang Tunggu
- 19 S.K.Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara
- 20 SK. Pengalihan PNS
- 21 S.K.Pemberhentian sebagai PNS
- 22 S.K.Pemberhentian Sementara
- 23 Surat Keterangan Pernyataan Hilang
- 24 Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang
- 25 S.K.Penggantian Nama
- 26 Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran
- 27 Akta Nikah/Cerai
- 28 Akta Kelahiran
- 29 Isian Formulir PUPNS
- 30 Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan
- 31 Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol
- 32 Surat Keterangan Mutasi Keluarga
- 33 Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang
- 34 Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
- 35 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
- 36 Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus
- 37 Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
- 38 Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri
- 39 Surat Izin Berpergian ke Luar Negeri
- 40 Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS
- 41 Ijasah/Sertifikat
- 42 S.K.Penempatan/Penarikan Pegawai
- 43 S.K.Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk
- 44 Surat Pertimbangan Status PNS
- 45 S.K.Pengaktifan Kembali Sebagai PNS
- 46 Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah
- 47 S.K.Pensiun

**11 Berkas Perseorangan Pejabat Negara**

### 3. PR PERENCANAAN

#### 00 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan

- 01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang/master plan
- 02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Rencana Strategis (Renstra)
- 03 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

#### 01 Program Kerja Tahunan

- 01 Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung
- 02 Program Kerja Tahunan Unit Kerja
- 03 Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi

#### 02 Penetapan/Kontrak Kinerja

- 01 Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- 02 Pimpinan Unit Kerja

#### 03 Laporan

- 01 Laporan Berkala
- 02 LAKIP
- 03 Laporan Insidental

#### 04 Evaluasi Program

- 01 Evaluasi Program Unit Kerja
- 02 Evaluasi Program Kementerian

### 4. HK HUKUM

#### 00 Program Legislasi

- 01 Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Kementerian
- 02 Program Legislasi Kementerian

#### 01 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

- 01 Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 02 Rancangan Peraturan Pemerintah
- 03 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden

#### 02 Peraturan Menteri

Naskah dinas yang berkenaan dengan peraturan Menteri sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi peraturan

**03 Keputusan/Ketetapan Menteri**

Naskah dinas yang berkenaan dengan keputusan/ketetapan Menteri sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi keputusan/ketetapan.

**04 Instruksi/Surat Edaran**

Naskah dinas yang berkenaan dengan instruksi/surat edaran sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi peraturan

01 Instruksi/Surat Edaran Menteri

02 Instruksi/Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II

**05 Surat Perintah**

Naskah dinas yang berkenaan dengan surat perintah sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi peraturan

01 Surat Perintah Menteri

02 Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II

**06 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional/Internasional**

Naskah dinas yang berkenaan dengan standar/pedoman/prosedur kerja yang menunjang kinerja pegawai di lingkungan Kementerian maupun masyarakat umum

**07 Nota Kesepahaman (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama**

Naskah dinas yang berkenaan dengan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama/Letter of Intens (LoI) baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

01 Dalam Negeri

02 Luar Negeri

**08 Dokumentasi Hukum**

**09 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum**

01 Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/Pembinaan Hukum

02 Laporan Hasil Pelaksanaan

**10 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi**

**11 Kasus/Sengketa Hukum**

01 Pidana

- 02 Perdata
- 03 Tata Usaha Negara

**12 Perizinan**

**13 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

- 01 Hak Cipta
- 02 Hak Paten
- 03 Hak Merk

**14 Penghargaan Kelembagaan**

**15 Permohonan Hak yang Ditolak**

- 01 Materi Rancangan Produk Hukum dan Unit Kerja Operasional
- 02 Proses Pembahasan Materi Produk Hukum di Tingkat Biro
- 03 Proses Pembahasan Materi Tingkat Antar Departemen/ Lembaga (Lintas Sektor)

**5. OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

**00 Struktur Organisasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi**

- 01 Pembentukan
- 02 Perubahan
- 03 Pembubaran

**01 Uraian Jabatan dan Tata Kerja**

**02 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional**

**03 Evaluasi Kementerian**

**04 Analisa Jabatan**

**05 Ketatalaksanaan (SOP)**

**6. UM UMUM**

**00 Kearsipan dan Ketatausahaan**

- 01 Administrasi Persuratan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan urusan surat-menyurat yang terdiri atas pemberitahuan pindah kantor, penambahan nomor telepon, alamat pejabat, spesimen tanda tangan pejabat, cap dinas, stempel draf, penomoran naskah dinas, pengiriman, ekspedisi, dan penyimpanan.

- 02 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip  
Naskah dinas yang berkenaan dengan ketatalaksanaan, pengolahan, penyimpanan, analisis nilai guna, pemindahan, perawatan, penyerahan, penyusutan, pemusnahan, dan konservasi, pelacakan arsip, serta penyelamatan arsip vital.
- 03 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
- 04 Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)  
Naskah dinas yang berkenaan dengan layanan jasa kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.
- 05 Penyusutan Kearsipan
- 06 Pembinaan Kearsipan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan sosialisasi dan pembinaan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.
- 07 Risalah/Notulen Rapat

**01 Kerumahtanggaan**

- 01 Pengadaan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan Rekanan/ Penawaran/Proposal/Brosur; Tender dan Kontrak/ Prakuifikasi dan Pasca Kualifikasi; Penunjukan Pemenang; Sanggahan; Surat Kuasa Kontrak; Berita Acara; Harga Mutu; Pembelian.
- 02 Pendistribusian
- 03 Telekomunikasi
- 04 Perjalanan Dinas  
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengurusan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan.
- 05 Administrasi Penggunaan Fasilitas  
Naskah dinas yang berkenaan dengan penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, wisma, rumah dinas, kendaraan, dan fasilitas kantor lainnya.
- 06 Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi

- 07 Pengurusan Kendaraan Dinas  
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengurusan surat-surat kendaraan dinas dan bus antar jemput, pemeliharaan, perbaikan, pengurusan dan masalah kendaraan.
- 08 Pemeliharaan Gedung dan Taman  
Naskah dinas yang berkenaan dengan pertamanan/landscaping, penghijauan, perbaikan gedung, perbaikan rumah dinas/wisma, kebersihan gedung dan taman.
- 09 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, Televisi, Kabel dan Komputer  
Naskah dinas yang berkenaan dengan perbaikan dan pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon, televisi, kabel dan komputer.
- 10 Ketertiban dan Keamanan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan masalah pengamanan dan ketertiban kantor serta rumah dinas.
- 11 Administrasi Pengelolaan Parkir
- 12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihandan Pegawai Lainnya.
- 13 Pelayanan Kesehatan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan/poliklinik.

**02 Keprotokolan**

- 01 Penyelenggaraan Acara Kedinasan
- 02 Buku Tamu
- 03 Agenda Kegiatan Pimpinan Instansi (Menteri, Eselon I, Eselon II)
- 04 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
- 05 Kunjungan Dinas Eksternal
- 06 Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat

## **7. HM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA**

### **00 Dokumentasi/Liputan**

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/fakta kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media meliputi kertas, foto, video, rekaman suara, multimedia serta tukar-menukar dokumentasi

### **01 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan**

Naskah dinas yang berkenaan dengan publikasi/penyebarluasan informasi seperti publikasi media elektronik, media cetak, naskah berita, poster, bulletin, leaflet, booklet, brosur, dan kliping.

01 Kliping Koran

02 Brosur/Leaflet/Poster/Plakat

03 Pengumuman/Pemberitaan

04 Pengaduan Masyarakat

### **02 Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi**

01 Hubungan Antar Lembaga Pemerintah

Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pemerintah/antar kementerian.

02 Hubungan Organisasi Sosial/LSM

Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerja sama organisasi sosial, kemasyarakatan atau LSM.

03 Hubungan dengan Perusahaan

04 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.

05 Forum Kehumasan

06 Hubungan Media Massa

Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerja sama media massa (siara pers, konferensi pers, kunjungan wartawan/peliputan), pendapat umum serta pengaduan masyarakat.

**03 Rapat Kerja/Dengar Pendapat/ *Hearing* DPR**

Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerja sama DPR RI (dengar pendapat/ *hearing*).

**04 Bahan/Materi Pidato/Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota**

**05 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal**

**06 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan**

Naskah dinas yang berkenaan dengan pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi dan laporan.

**07 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan**

**08 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf**

**09 Pidato/Sambutan Pimpinan**

Naskah dinas yang berkenaan dengan bahan/materi pidato Pimpinan

01 Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

02 Eselon I/II

**10 Kepustakaan**

01 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka

02 Pengadaan dan Pengolahan Bahan

03 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi

04 Preservasi Bahan Pustaka

**8. PW PENGAWASAN**

**00 Rencana Pengawasan**

01 Rencana Strategis Pengawasan

02 Rencana Kerja Tahunan

03 Rencana Kinerja Tahunan

04 Penetapan Kinerja Tahunan

05 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional

**01 Pedoman Kebijakan Pengawasan**

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan pedoman kebijakan pengawasan sampai dengan penetapannya.

**02 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan**

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sampai dengan penetapannya.

**03 Pelaksanaan Pengawasan**

- 01 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL).
- 02 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut (TL).
- 03 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut (TL).
- 04 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat.
- 05 Laporan Pemutakhiran Data
- 06 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
- 07 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
- 08 Good Corporate Governance (GCG)

**04 Pemeriksaan Khusus**

Naskah dinas yang berkenaan dengan pemeriksaan khusus tentang penyelesaian kasus-kasus yang merugikan negara

**05 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus**

- 01 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Perlu Ditindaklanjuti  
Naskah dinas yang berkenaan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang perlu ditindaklanjuti
- 02 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan

Khusus yang Tidak Perlu Ditindaklanjuti

Naskah dinas yang berkenaan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang tidak perlu ditindaklanjuti

**06 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

**07 Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

**08 Hasil Analisis Laporan dan Evaluasi Pengawasan**

Naskah dinas yang berkenaan dengan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah dan laporan pengawasan lainnya, serta penyusunan hasil analisis dan evaluasi.

B.ARSIP SUBSTANTIF

**1. BIJ KEBIJAKAN**

**00 Penyiapan Bahan/Proses Penyusunan Kebijakan**

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan bahan, pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan serta pengumpulan dan pengolahan data

**01 Penetapan dalam Bentuk Pengaturan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)**

**2. PKT PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

**00 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

**01 Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan**

Naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan

teknis satuan kawasan pengembangan transmigrasi yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan rencana satuan kawasan pengembangan

02 Perencanaan Teknis Satuan Permukiman

Naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan teknis satuan permukiman yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan rencana satuan permukiman.

03 Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan

Naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan sarana dan prasarana kawasan

04 Perencanaan Pengembangan Masyarakat

Naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan masyarakat yang meliputi perencanaan pengembangan ekonomi dan perencanaan pengembangan sosial budaya

**01 Penyediaan Tanah Transmigrasi**

01 Fasilitasi Pencadangan Tanah

Naskah dinas yang berkaitan dengan fasilitasi pencadangan tanah yang meliputi identifikasi status dan penggunaan lahan serta pengurusan status tanah

02 Identifikasi dan Penataan Tanah

Naskah dinas yang berkaitan dengan identifikasi dan penataan tanah yang meliputi identifikasi penggunaan dan kepemilikan tanah serta penataan penggunaan dan kepemilikan tanah

03 Pengelolaan Tanah

Naskah dinas yang berkaitan dengan pengelolaan tanah yang meliputi pengurusan hak pengelolaan lahan serta pemeliharaan hak pengelolaan lahan

04 Dokumentasi Penyediaan Tanah

Naskah dinas yang berkaitan dengan dokumentasi penyediaan tanah yang meliputi pengolahan data serta penyajian informasi dan pelaporan

**02 Pembangunan Permukiman Transmigrasi**

- 01 **Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyiapan dan evaluasi lahan permukiman transmigrasi
- 02 **Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman**  
Naskah yang berkenaan dengan penyiapan dan evaluasi sarana permukiman transmigrasi
- 03 **Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman transmigrasi
- 04 **Kelayakan Permukiman**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kelayakan permukiman yang meliputi evaluasi kelayakan dan perwujudan ruang

**03 Bina Potensi Kawasan Transmigrasi**

- 01 **Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan identifikasi dan informasi potensi kawasan transmigrasi
- 02 **Advokasi Kawasan**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan advokasi kawasan yang meliputi penyiapan bahan advokasi serta evaluasi dan pelaporan.
- 03 **Perencanaan Kawasan**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan kawasan yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan rencana kawasan transmigrasi.
- 04 **Fasilitasi Penetapan Kawasan**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan fasilitasi penetapan kawasan yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penilaian kawasan transmigrasi
- 05 **Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan mediasi dan kerja sama antar daerah.

#### **04 Penataan Persebaran Penduduk**

- 01 **Penyiapan Perpindahan**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyiapan perpindahan penduduk yang meliputi penyerasian perpindahan dan administrasi perpindahan.
- 02 **Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat yang meliputi pendaftaran dan seleksi serta ketrampilan calon transmigran dan penduduk setempat.
- 03 **Pelayanan Perpindahan**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelayanan perpindahan yang meliputi penampungan dan perbekalan serta pengangkutan.
- 04 **Penataan dan Adaptasi**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penataan dan adaptasi penduduk

### **3. MKT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

#### **00 Promosi dan Kemitraan**

- 01 **Promosi dan Publikasi**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan promosi dan publikasi.
- 02 **Kemitraan Badan Usaha**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kemitraan badan usaha yang meliputi fasilitasi kemitraan badan usaha dan evaluasi kemitraan badan usaha
- 03 **Kemitraan Masyarakat**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kemitraan masyarakat yang meliputi fasilitasi dan evaluasi fasilitasi kemitraan masyarakat
- 04 **Kemitraan Kelembagaan Pemerintah**  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kemitraan kelembagaan pemerintah yang meliputi fasilitasi dan evaluasi kemitraan kelembagaan pemerintah

**01 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi**

- 01 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi
- 02 Pengembangan Prasarana Permukiman dan Kawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi
- 03 Penyerasian Lingkungan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyerasian lingkungan yang meliputi rencana penyerasian dan mitigasi lingkungan transmigrasi
- 04 Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi
- 05 Standardisasi Sarana dan Prasarana  
Naskah dinas yang berkaitan dengan standardisasi sarana dan prasarana kawasan transmigrasi

**02 Pengembangan Usaha Transmigrasi**

- 01 Produksi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan produksi usaha transmigrasi yang meliputi produksi tanaman pangan dan produksi non tanaman pangan
- 02 Pengolahan dan Pemasaran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pengolahan hasil dan pemasaran hasil usaha transmigrasi
- 03 Lembaga Ekonomi dan Permodalan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan lembaga ekonomi dan permodalan yang meliputi penguatan kelembagaan serta kerja sama kelembagaan
- 04 Kewirausahaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kewirausahaan yang meliputi pengembangan wirausaha dan kemitraan usaha

**03 Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi**

01 Pangan dan Kesehatan

Naskah dinas yang berkaitan dengan pangan dan kesehatan

02 Fasilitasi Pendidikan

Naskah dinas yang berkaitan dengan fasilitasi pendidikan yang meliputi fasilitasi pendidikan usia dini dan pendidikan dasar serta fasilitasi pendidikan menengah dan perguruan tinggi

03 Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budaya

Naskah dinas yang berkaitan dengan fasilitasi mental spiritual dan seni budaya

04 Bina Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat

Naskah dinas yang berkaitan dengan bina kelembagaan pemerintah dan masyarakat

**04 Pelayanan Pertanahan Transmigrasi**

01 Pengukuran Bidang Tanah

Naskah dinas yang berkaitan dengan pengukuran bidang tanah yang meliputi pengukuran dan pembagian tanah serta pengukuran tata batas

02 Pengurusan Hak Atas Tanah

Naskah dinas yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah yang meliputi inventarisasi kepemilikan tanah dan legalitas hak atas tanah.

03 Advokasi Pertanahan

Naskah dinas yang berkaitan dengan identifikasi masalah pertanahan yang meliputi identifikasi masalah pertanahan serta rekognisi dan kompensasi.

04 Dokumentasi Pelayanan Pertanahan

Naskah dinas yang berkaitan dengan dokumentasi pelayanan pertanahan yang meliputi pengolahan data serta penyajian dan pelaporan.

#### **4. PDT PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

##### **00 Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal**

###### 01 Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan indikator daerah tertinggal yang meliputi pengumpulan dan analisis data serta pengolahan dan penyajian

###### 02 Identifikasi Daerah Tertinggal

Naskah dinas yang berkaitan dengan identifikasi daerah tertinggal yang meliputi pengumpulan dan analisis serta pengolahan dan penyajian

###### 03 Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian/Lembaga

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian/lembaga yang meliputi penyusunan rencana dan skema pendanaan

###### 04 Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan skema pendanaan daerah yang meliputi penyusunan rencana dan skema pendanaan

###### 05 Evaluasi dan Pelaporan

Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan

##### **01 Pengembangan Sumber Daya Manusia**

###### 01 Pendidikan

Naskah dinas yang berkaitan dengan pendidikan yang meliputi peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana

###### 02 Kesehatan

Naskah dinas yang berkaitan dengan kesehatan yang meliputi peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana

###### 03 Keterampilan

Naskah dinas yang berkaitan dengan keterampilan yang meliputi peningkatan kualitas dan peningkatan sarana dan prasarana

###### 04 Tenaga Kerja

Naskah dinas yang berkaitan dengan tenaga kerja yang meliputi peningkatan kapasitas tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja

05 Inovasi dan Penerapan Teknologi

Naskah dinas yang berkaitan dengan inovasi dan penerapan teknologi pengembangan sumber daya manusia

**02 Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup**

01 Sumber Daya Hayati

Naskah dinas yang berkaitan dengan sumber daya hayati yang meliputi sumber daya hayati berbasis daratan dan sumber daya hayati berbasis maritim

02 Tata Guna Lahan

Naskah dinas yang berkaitan tata guna lahan yang meliputi perencanaan tata guna lahan dan pendayagunaan tata guna lahan

03 Pariwisata

Naskah dinas yang berkaitan pariwisata yang meliputi pengembangan potensi pariwisata dan promosi pariwisata

04 Sumber Daya Energi

Naskah dinas yang berkaitan sumber daya energi yang meliputi pemanfaatan energi terbarukan dan pemanfaatan energi non terbarukan

05 Lingkungan Hidup

Naskah dinas yang berkaitan lingkungan hidup yang meliputi pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

**03 Peningkatan Sarana dan Prasarana**

01 Sarana dan Prasarana Transportasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara

02 Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman

Naskah dinas yang berkaitan dengan Sarana dan prasarana air bersih dan permukiman

- 03 Sarana dan Prasarana Ekonomi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi industri dan perdagangan serta pertanian, kelautan dan perikanan
- 04 Sarana dan Prasarana Energi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana energi yang meliputi energi baru terbarukan nabati dan energi baru terbarukan non nabati
- 05 Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi yang meliputi jaringan informasi dan jaringan telekomunikasi

**04 Pengembangan Ekonomi Lokal**

- 01 Investasi dan Permodalan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan investasi dan permodalan
- 02 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Naskah dinas yang berkaitan dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
- 03 Potensi Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan potensi produk unggulan yang meliputi identifikasi dan analisis potensi produk unggulan dan pengembangan produk unggulan
- 04 Kemitraan Usaha  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kemitraan usaha yang meliputi identifikasi usaha dan evaluasi dan pelaporan
- 05 Industri, Distribusi dan Pemasaran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan industri, distribusi dan pemasaran

**5. PDU PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU**

**00 Pengembangan Daerah Rawan Pangan**

- 01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Pangan
- 02 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Daerah Rawan Pangan
- 03 Pemantauan dan Evaluasi

**01 Pengembangan Daerah Perbatasan**

- 01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Perbatasan
- 02 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Daerah Perbatasan
- 03 Pemantauan dan Evaluasi

**02 Penanganan Daerah Rawan Bencana**

- 01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Bencana
- 02 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Daerah Rawan Bencana
- 03 Pemantauan dan Evaluasi

**03 Penanganan Daerah Pasca Konflik**

- 01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Pasca Konflik
- 02 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Daerah Pasca Konflik
- 03 Pemantauan dan Evaluasi

**04 Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar**

- 01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
- 02 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
- 03 Pemantauan dan Evaluasi

**6. PMD PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

**00 Pelayanan Sosial Dasar**

- 01 Pelayanan Dasar  
Naskah dinas yang berkenaan dengan pelayanan dasar masyarakat desa yang meliputi fasilitasi pelayanan kesehatan desa dan fasilitasi pelayanan pendidikan desa
- 02 Kesejahteraan Masyarakat  
Naskah dinas yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat desa yang meliputi fasilitasi kesejahteraan perempuan dan anak serta fasilitasi kesejahteraan sosial
- 03 Adat dan Budaya  
Naskah dinas yang berkenaan dengan adat dan budaya masyarakat desa yang meliputi fasilitasi adat dan kearifan lokal serta fasilitasi seni dan budaya
- 04 Perlindungan Sosial  
Naskah dinas yang berkenaan dengan perlindungan

sosial masyarakat desa yang meliputi kerukunan dan ketentraman desa serta penanganan konflik sosial desa

05 Pengembangan Akses Informasi Masyarakat

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengembangan akses informasi masyarakat desa yang meliputi fasilitasi pengembangan media informasi serta pengelolaan akses informasi

**01 Pengembangan Usaha Ekonomi Desa**

01 Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa

Naskah dinas yang berkenaan dengan kelembagaan badan usaha milik desa yang meliputi fasilitasi pembentukan dan pelebagaan badan usaha milik desa

02 Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengembangan usaha badan usaha milik desayang meliputi fasilitasi pengembangan usaha serta pemasaran hasil usaha badan usaha milik desa

03 Perdagangan Desa

Naskah dinas yang berkenaan dengan perdagangan desa yang meliputi fasilitasi pengembangan pasar desa dan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran

04 Permodalan Ekonomi Desa

Naskah dinas yang berkenaan dengan permodalan ekonomi desa yang meliputi fasilitasi permodalan usaha ekonomi masyarakat dan desa serta fasilitasi usaha kredit mikro

05 Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Naskah dinas yang berkenaan dengan usaha ekonomi masyarakat desa yang meliputi fasilitasi tata kelola ekonomi desa dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan desa

**02 Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

01 Sumber Daya Hutan, Pertanian dan Pertambangan

Naskah dinas yang berkaitan dengan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan yang meliputi

fasilitas pendayagunaan sumber daya hutan dan pertanian, serta sumber daya pertambangan.

02 Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim

Naskah dinas yang berkaitan dengan sumber daya air, pertanahan dan maritim yang meliputi fasilitas pendayagunaan sumber daya air dan pertanian serta sumber daya pesisir kelautan

03 Lingkungan Hidup

Naskah dinas yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang meliputi fasilitas rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup desa.

04 Teknologi Tepat Guna

Naskah dinas yang berkenaan dengan teknologi tepat guna yang meliputi fasilitas inovasi dan promosi serta pemetaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

**03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa**

01 Sarana dan Prasarana Permukiman Desa

Naskah dinas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana permukiman desa yang meliputi fasilitasi pembangunan permukiman desa serta fasilitasi pembangunan lingkungan permukiman desa

02 Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

Naskah dinas yang berkenaan dengan sarana dan prasarana transportasi desa yang meliputi fasilitasi sarana dan prasarana transportasi desa

03 Sarana Prasarana Pendukung Ekonomi Desa

Naskah dinas yang berkenaan dengan sarana prasarana pendukung ekonomi desa yang meliputi fasilitasi sarana dan prasarana produksi serta pemasaran

04 Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa

Naskah dinas yang berkenaan dengan Sarana dan prasarana elektrifikasi desa yang meliputi fasilitasi sarana dan prasarana elektrifikasi desa

05 Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa

Naskah dinas yang berkenaan dengan sarana dan prasarana telekomunikasi desa yang meliputi fasilitasi sarana dan prasarana telekomunikasi desa

**04 Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- 01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa  
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas masyarakat desa yang meliputi fasilitasi pembelajaran dan pendampingan dan kaderisasi masyarakat desa.
- 02 Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif  
Naskah dinas yang berkenaan dengan perencanaan dan pembangunan partisipatif yang meliputi fasilitasi perencanaan partisipatif dan fasilitasi pembangunan partisipatif.
- 03 Advokasi Peraturan Desa  
Naskah dinas yang berkenaan dengan advokasi peraturan desa yang meliputi analisis dan penyusunan peraturan desa serta advokasi kewenangan dan peraturan desa.
- 04 Ketahanan Masyarakat Desa  
Naskah dinas yang berkenaan dengan ketahanan masyarakat desa yang meliputi fasilitasi advokasi hukum dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa
- 05 Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa  
Naskah dinas yang berkenaan dengan kerja sama dan kemitraan masyarakat desa yang meliputi fasilitasi kerja sama desa dan fasilitasi kemitraan.

**7. PKP PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

**00 Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Naskah dinas yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi perencanaan program serta evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan

- 01 Perencanaan Program
- 02 Evaluasi dan Pelaporan

**01 Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan**

- 01 Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan Analisa kebijakan

ekonomi kawasan perdesaan yang meliputi analisa kebijakan pemanfaatan hutan dan analisa kebijakan pertambangan

02 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang meliputi sinkronisasi program pemerintah dan penyiapan potensi masyarakat

03 Pengembangan Permodalan dan Investasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan permodalan dan investasi yang meliputi pengembangan permodalan dan pengembangan investasi

04 Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran yang meliputi pengembangan fasilitas usaha ekonomi dan pengembangan fasilitas pemasaran

**02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan**

Naskah dinas yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana ekonomi serta sarana dan prasarana pelayanan dasar

01 Penyusunan Rumusan Kebutuhan Saran dan Prasarana

02 Sarana dan Prasarana Ekonomi

03 Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

**03 Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan**

Naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan yang meliputi identifikasi dan pemetaan potensi serta pengembangan dan pemanfaatan potensi

01 Identifikasi dan Pemetaan Potensi

02 Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi

**04 Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas**

01 Pendampingan Manajemen dan Teknis

Naskah dinas yang berkaitan dengan pendampingan manajemen dan teknis yang meliputi penyiapan pendampingan manajemen dan pendampingan teknis

- 02      Penyiapan Media dan Pembelajaran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyiapan media dan pembelajaranyang meliputi penyiapan media dan pembelajaran
- 03      Kerja Sama dan Kemitraan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kerja sama dan kemitraan yang meliputi kerja sama antar lembaga dan kemitraan usaha
- 04      Keserasian Kawasan Perdesaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan keserasian kawasan perdesaan yang meliputi identifikasi dan fasilitasi

**8. BLI   BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI**

**00   Penelitian dan Pengembangan**

- 01   Pemetaan Kebutuhan Bahan Kebijakan dan Telaahan
- 02   Penelitian/Kajian
- 03   Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

**01   Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara**

- 01   Kurikulum, Metode, Standar/Mutu dan Pedoman Diklat
- 02   Program diklat
- 03   Pra Jabatan
- 04   Perjenjangan Struktural
- 05   Fungsional
- 06   Teknis
- 07   Jarak Jauh
- 08   Seminar
- 09   Lokakarya
- 10   Diskusi
- 11   Simposium
- 12   Temu Karya
- 13   Evaluasi Materi Penyelenggaraan
- 14   Evaluasi Pengajar/Instruktur/Fasilitator
- 15   Evaluasi Peserta
- 16   Evaluasi Sarana dan Prasarana

- 17 Evaluasi Alumni Peserta
- 18 Laporan Penyelenggaraan

**02 Pelatihan Masyarakat**

- 01 Pengelolaan Database Program Pelatihan Masyarakat
- 02 Monitoring dan Evaluasi Laporan Pelatihan Masyarakat
- 03 Penyusunan Pelaporan Pusat Pelatihan Masyarakat
- 04 Penyusunan Kebijakan Teknis Pelatihan Masyarakat
- 05 Pendampingan Pelatihan Masyarakat untuk Penyusunan Program Pelatihan Masyarakat
- 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Masyarakat
- 07 Sosialisasi/Bimtek/Sinkronisasi Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pelatihan Masyarakat
- 08 Sosialisasi/Bimtek/Sinkronisasi Penyusunan Modul Pelatihan Masyarakat
- 09 Penyusunan Standar Kompetensi Pelatihan
- 10 Identifikasi Kebutuhan Standardisasi Pelatihan Masyarakat
- 11 Penyusunan Pedoman Standarisasi Pelatihan Masyarakat
- 12 Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek Standar Pelatihan Masyarakat
- 13 Evaluasi Penerapan Standar Pelatihan Masyarakat
- 14 Fasilitasi Kerja Sama Pelatihan Masyarakat dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah
- 15 Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan Pelatihan Masyarakat
- 16 Sosialisasi/Bimtek/Desiminasi Kerja Sama Pelatihan Masyarakat
- 17 Sosialisasi/Bimtek Pengembangan Karir Pejabat Fungsional dan Tenaga Pelatih
- 18 Fasilitasi Sertifikasi Pejabat Fungsional dan Tenaga Pelatih/Pendamping Desa
- 19 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Jabatan Fungsional
- 20 Pelatihan Fungsional Pelatihan Masyarakat

- 21 Dukungan Kebijakan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya
- 22 Bimtek Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

**03 Data dan Informasi**

- 01 Penyusunan Datin
- 02 Publikasi dan Informasi Data Desa
- 03 Penyusunan Database Profil Desa di Perbatasan
- 04 Penyusunan Majalah Balilatfo
- 05 Penyusunan Buku Perkembangan Daerah Tertentu
- 06 Sosialisasi Pedoman Tentang Pengelolaan Datin Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 07 Dukungan Publikasi dan Informasi Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 08 Pengelolaan Sistem Informasi dan Website Kemendesa
- 09 Sosialisasi Sistem Informasi Terpadu
- 10 Pengadaan Email
- 11 Pemeliharaan Sistem Informasi Terpadu
- 12 Pengembangan Sistem Informasi Desa Online
- 13 Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Kemendesa
- 14 Pengelolaan Operasional Layanan LPSE
- 15 Pengadaan Software Arch GIS
- 16 Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
- 17 Pengadaan Software dan Security Jaringan Komunikasi Data
- 18 Pengembangan dan Perawatan Jaringan Lokal Area Network dan Data Center
- 19 Pembinaan Pranata Komputer

**04 Unit Pelaksana Teknis**

- 01 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pelatihan Masyarakat
- 02 Penyusunan Materi dan Bahan Pelatihan Masyarakat
- 03 Penyusunan Materi Pengembangan Pelatihan Masyarakat, Tenaga Keahlian, dan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- 04 Pengelolaan Data dan Penerapan Sistem Informasi
- 05 Bimtek Tenaga Keahlian dan Jabatan Fungsional

Penggerak Swadaya Masyarakat

- 06 Kerja Sama Kelembagaan
- 07 Pelaksanaan Fasilitasi Uji Kompetensi di Bidang Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Tertentu dan Transmigrasi
- 08 Penelitian, Pengkajian dan Penerapan Pengembangan Metode Adaptasi Teknologi di Bidang Teknik Produksi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 09 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

BAB III  
PENUTUP

Demikian Peraturan Menteri ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJODJO

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan**  
**Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**